

**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



**Oleh :
IRPAN
NIM : T310911021**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Oleh :
IRPAN
NIM : T310911021

Surakarta, 30 Juni 2016
Disertasi
Telah Disetujui Oleh Tim Promotor

Promotor

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1001

Co. Promotor

Dr. Hani Purwadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19641201 200501 1001



Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001

Lembar Pengesahan Penguji Disertasi

**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

**IRPAN
NIM : T310911021**

Surakarta, 03 Agustus 2016
Telah Disetujui oleh Tim Penguji

Ketua	: Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
Sekretaris	: Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
Anggota	: Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.
	: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
	: Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
	: Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.
	: Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.
	: Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
	: Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum.


Ketua Program
Doktor Ilmu Hukum
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19570203 198503 2001

Mengotahui

Dekan
Fakultas Hukum
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan, atas berkat karunia serta kasihnya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis, sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “ KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU”

Ide dasar dalam penulisan disertasi ini, bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak saja sekedar memperlihatkan munculnya sebuah lembaga baru dalam khasanah peradilan Indonesia, melainkan pula membawa pengaruh pada pemaknaan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dimana identifikasi kewenangan dalam sistem peradilan pidana selama ini telah dispesifikasikan secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyidikan dilakukan oleh Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan kewenangan penuntutan menjadi monopoli jaksa. Monopoli seperti itu tidak berlaku lagi jika kasusnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dilihat secara parsial, tiga institusi penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Kejaksaan dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang merupakan komponen-komponen pendukung dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Masing-masing institusi penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangan penyidikan mempunyai tingkat otonomi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan potensi bahwa masing-masing institusi penegak hukum dalam

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi tidak saja karena masing-masing institusi diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, namun lebih dari itu mereka masing-masing mempunyai mekanisme, cara kerja, dan tata organisasi yang terpisah dengan kewenangan dan kekuasaan masing-masing.

Pembagian komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana tidak dapat hanya dipandang secara parsial, karena seluruh komponen harus saling mendukung dan bekerjasama dalam satu kesatuan untuk mencapai sistem secara keseluruhan bukan sekedar mencapai tujuan dari masing-masing komponen atau subsistem itu sendiri.

Penulisan disertasi ini sendiri memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan karena proses pemantapan dan penataan sistematika konsep yang harus dilakukan oleh penulis di samping memperhatikan prinsip-prinsip metodologi penelitian yang telah ditetapkan. Dalam pemantapan dan penataan sistematika konsep tersebut, Penulis selalu ingat pepatah Latin, "*Nescit vox missa reverti*", yang berarti "kata yang telah dilontarkan tidak dapat ditarik kembali." Demikian juga dengan pepatah "*vox audita perit, littera scripta manet*", yang berarti suara yang terdengar itu hilang, akan tetapi kalimat yang tertulis tetap tinggal.

Penulis mengakui secara jujur bahwa disertasi ini pada hakikatnya bukanlah semata-mata buah karya penulis sendiri, akan tetapi telah melibatkan banyak pihak yang ikut memberikan kontribusinya baik berupa motivasi, pikiran, tenaga dan *financial* yang tak terhingga nilainya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan dalam pengantar disertasi ini kepada :

1. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku. Rektor Universitas Sebelas Maret, beserta stafnya, yang telah menciptakan iklim kondusif di lingkungan Universitas Sebelas Maret, sehingga memudahkan penulis untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh pihak lembaga;
2. Yang amat terpelajar Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan ikut mendukung kelancaran penulis dalam penyelesaian studi;

3. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, di tengah kesibukanya beliau berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis selaku Promotor dalam penulisan disertasi ini dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan, dan usulan penambahan literatur untuk dapat menyempurnakan penulisan disertasi ini;
4. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah berhasil mengelola program pendidikan dengan menggunakan manajemen professional dan bermoral, sehingga berhasil meningkatkan wawasan keilmuan sekaligus memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri penulis selama menjadi mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum untuk menyelesaikan studinya. Begitu pula penulis ucapkan terimakasih kepada staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan ramah, kekeluargaan dan sangat memuaskan, sehingga ikut mendukung kelancaran penulis dalam penyelesaian studi;
5. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., di tengah kesibukanya sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, beliau berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis selaku Co. Promotor dalam penulisan disertasi ini, dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan, dan usulan penambahan literatur untuk dapat menyempurnakan penulisan disertasi ini;
6. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., selaku dosen penunjang disertasi penulis, ditengah kesibukanya sebagai Guru besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, beliau berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan, dan usulan penambahan literatur serta memberikan buku-buku literatur untuk dapat menyempurnakan disertasi ini;

7. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., yang pada masa pertengahan perkuliahan menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulis sungguh berterima kasih kepada beliau yang selama ini telah memberikan motivasi dan selalu menanyakan kepada penulis mengenai perkembangan dalam penyelesaian penulisan disertasi. Disamping itu beliau juga banyak memberikan masukan penyempurnaan dalam ujian proposal disertasi, Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi, dan ujian Kelayakan Disertasi serta merekomendasikan sejumlah buku literatur yang harus dirujuk terkait dengan teori yang dipergunakan dalam pembahasan dan menganalisis hasil penelitian, sehingga membantu melengkapi teori yang digunakan dalam penulisan disertasi ini;
8. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Setiono. S.H., M.S., selaku Rektor Universitas Surakarta (UNSA) yang pada waktu awal penulis diterima sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, beliau menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, yang telah berkenan memberikan pencerahan pada bidang penelitian hukum. Penjelasan beliau yang cukup mendasar berkaitan dengan metodologi penelitian hukum benar-benar telah memberi bekal bagi penulis untuk berani melangkah melakukan penelitian dalam penulisan disertasi ini.
9. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Widodo Trisno Novianto, S.H., M.Hum., yang secara simultan dan penuh ketelatenan telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam ujian seminar hasil penelitian, ujian kelayakan disertasi, dan ujian tertutup naskah disertasi serta telah merekomendasikan adanya penyempurnaan judul, perumusan masalah dan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan disertasi ini;
10. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Brojo S. Soejono, S.H., M.S., selaku ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta yang telah berkenan memberikan rekomendasi kepada penulis untuk menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan ucapan terimakasih pula kepada Bapak Soewarjo, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) beserta stafnya yang telah memberikan perhatian, motivasi

- kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
11. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan disertasi ini;
 12. Bapak Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum., selaku Penyidik dan/atau Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dengan sangat terbuka berkenan menerima penulis serta memberikan bahan informasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan disertasi ini.
 13. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.SI. Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yang dengan sangat terbuka berkenan menerima penulis serta memberikan bahan informasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan disertasi ini.
 14. Rekan-rekan sejawat Advokat baik yang tergabung dalam Asosiasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) maupun Konggres Advokat Indonesia (KAI) cabang Surakarta, tidak pernah kenal lelah untuk memotivasi dan menagih komitmen penulis dalam penyelesaian studi.
 15. Penulis ingin menyampaikan terimakasih teristimewa serta lebih khusus kepada istriku tercinta Dra. Indyah Kuswinarni, yang senantiasa berdoa untuk kesuksesan penulis, menjaga suasana keharmonisan keluarga, dan senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan penulis selama menyelesaikan penulisan disertasi ini. Untuk selanjutnya penulis ucapkan pula terimakasih kepada Ketiga anaku tersayang ananda Indira Putri Irfani, S.H., yang tengah menempuh studi S2 Kenotariatan pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ananda Indita Putri Kusumawardani, yang tengah menempuh studi S.1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan ananda Dyandika Irfan Nugraha yang tengah menempuh pendidikan di SMA Negeri I Surakarta, yang menjadi sumber inspirasi dan energi luar biasa bagi penulis untuk berjuang dan bekerja keras dalam menyelesaikan studi. Selama ini waktu dan perhatian penulis kepada istri dan anak-anak telah tersita saat penulis menyelesaikan studi pada tahap penyelesaian penulisan disertasi ini.

16. Penghargaan yang tinggi pada yang mulia orang tua penulis, Bapak Warijan dan Almh. Rasminah, yang telah merawat, mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan rasa kasih sayang. Kenangan yang tak pernah terlupakan pada pengorbanan beliau yang senantiasa berjuang keras dalam menghadapi tantangan di tengah keterbatasan kondisi ekonomi dalam keluarga pada waktu penulis belum dewasa, sehingga menjadi sumber inspirasi bagi penulis dalam pembentukan karakter semangat juang dan pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan guna mencapai cita-cita. Ucapan terimakasih layak pula penulis sampaikan kepada bapak/ibu mertua, Ibu Sumarni dan Alm. Radya Mintarja, yang turut mendoakan penulis untuk menjadi orang yang sukses.
17. Terimakasih pula untuk rekan-rekan seangkatan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret serta saudara-saudara penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya, dalam disertasi ini masih banyak kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran demi kesempurnaan disertasi ini sangat diharapkan.

Surakarta, 30 Juni 2016

Penulis

Irpan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PROMOTOR	ii
PENGESAHAN PENGUJI DISERTASI	iii
PERNYATAAN	iV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK.....	Xi
ABSTRACT	X ii
DAFTAR ISI	Xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	23
A. Landasan Teori	23
1. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)	24
2. Teori Sistem hukum (<i>Legal System</i>)	42
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	51
B. Kajian Pustaka	64
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Khusus	64
2. Tindak Pidana Korupsi	83
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	127
4. Institusi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	137
C. Penelitian yang Relevan	166
D. Kerangka Berpikir	179
BAB III METODE PENELITIAN	180
A. Jenis dan Bentuk Penelitian.....	180
B. Konsep Hukum.....	181
C. Pendekatan Penelitian	182

D. Sumber Informasi Penelitian.....	183
E. Teknik Pengumpulan Sumber Informasi Penelitian	184
F. Teknik Analisis Sumber Informasi Penelitian.....	185
G. Kerangka Konseptual	187
BAB IV PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PADA SAAT INI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU.....	196
A. Latar Belakang dan urgensi Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak pidana Korupsi di Indonesia	196
1. Latar Belakang badan khusus anti Korupsi	196
2. Tim Gabungan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi	202
3. Komisi Pemberantasan Korupsi	210
4. Legitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	221
B. Proses Penyidikan Tindak pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Saat Ini Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	233
1. Penanganan pengaduan atau laporan masyarakat mengenai dugaan tindak korupsi oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat	234
2. Tahap Penyelidikan.....	235
3. Tahap Penyidikan.....	240
4. Tahap Penuntutan	249
C. Capaian Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Bidang Penindakan Tahun 2004 – Tahun 2014.....	261
D. Koordinasi dan Supervisi oleh Komisi Pembarantasan Korupsi Terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.....	274
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEHINGGA BELUM DAPAT MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU	294

A. Substansi Hukum	296
B. Struktural (<i>legal structure</i>)	337
C. Budaya Hukum.....	344
D. Contoh Sengketa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kasus Simulator SIM Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	252
BAB VI KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIMASA MENDATANG UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU.....	
A. Komisi Anti Korupsi Di Beberapa Negara	363
B. Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Di Masa Mendatang Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu	374
1. Substansi Hukum.....	374
2. Struktur Hukum.....	377
BAB VII PENUTUP	
A. Simpulan.....	392
B. Implikasi.....	400
C. Rekomendasi.....	401
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Irpan, 2016, Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Promotor : Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Co Promotor : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., Disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu; (2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga belum dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu; (3) Untuk merumuskan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa mendatang sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau non doktrinal, yaitu penelitian yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *inconcreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian ini terdapat gabungan dua tahapan kajian, yaitu : tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dan tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *inconcreto*. Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode penalaran (logika) induktif, yakni yang bertolak dari data/fakta yang bersifat khusus menuju abstraksi yang bersifat umum, sekaligus menggunakan penalaran (logika) deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju kepada permasalahan yang sifatnya konkrit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses penyidikan tindak pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini belum sepenuhnya menganut dan menjalankan prinsip ketepaduan, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi Proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini sehingga belum dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu adalah dipengaruhi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. (3) Kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa mendatang sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu adalah perlu dibentuk badan penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan dibawah koordinasi dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pengangkatan dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usulan dari masing-masing pimpinan institusi penyidik yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung.

Kata Kunci : *Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.*

ABSTRACT

Irpan, 2016, The Investigation Policy of Corruption Criminals by The Commission of Corruption Eradication for The Integrated Criminal Justice System Achievement. Promotor : Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Co Promotor : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., Disertasion : Surakarta, The Doctoral in law Science, Faculty of law, Sebelas Maret University.

The purpose of this dissertation is: (1) to find out and analyze the process of corruption investigation by the Commission of Corruption Eradication (Komisi Pemberantasan Korupsi) during this time in the concept of the integrated criminal justice system; (2) To identify and analyze the factors affecting the process of the corruption investigation by the Commission of Corruption Eradication, which is not actualize the integrated criminal justice system yet; (3) To formulate the investigation policy of corruption criminals by the Commission of Corruption Eradication in the future so it can realize the integrated criminal justice system. This legal research is a normative research, with the source of secondary data or the data which is obtained from the literatures, and an empirical research or non-doctrinal research, a research that is begun from the written positive law, enacted to inconcreto legal occation in the society, so this research is using two phases of the study: the first is a study about the normative law in force, and the second is the application in the inconcreto occation. The reasoning method chosen by the author is the method of inductive (logical) reasoning, which is departed from the special data/fact to the general abstaction, at a time using the method of deductive (logical) reasoning, which is to draw the conclusion from a general issue to the concrete issue.

The result of this study showed that: (1) the corruption investigation by the Commission of Corruption Eradication has not fully embrace and execute the integrity principle yet, or has not fully realize the integrated criminal justice system yet; (2) factors affecting the process of corruption investigation by the Commission of Corruption Eradication during this time that has not been able to realize the integrated criminal justice system is influenced by the legal substance, legal structure, and legal culture; (3) the policy of corruption investigation by the Commission of Corruption Eradication in the future so it can realize the integrated criminal justice system is essential to establish a corruption investigation's body whose members are the combination of the Police Investigators, Judiciary Investigators, and the Investigators from the Commission of Corruption Eradication, under the coordination and the supervision of the Commision of Corruption Eradication, who are appointed by the Supreme Court by the proposal from each of the related institution's investigators and responsible to the Supreme Court.

Keywords : *Commission of Corruption Eradication, Investigation Policy, Integrated Criminal Justice System.*